

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Kepala Sekolah/Madrasah dalam Manajemen Pengelolaan Gender di MI Matholiul Huda Troso 02

Dari hasil penelitian dan tinjauan pustaka dapat dilihat fungsi serta tugas Kepala Sekolah salah satunya adalah melakukan pengelolaan atau manajerial terhadap kondisi yang ada di sekolah/madrasah yang dipimpin. Banyak faktor yang harus dapat dikelola kepala sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta mencapai tujuan dalam melakukan fungsi pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam konteks ini yang dimaksud setiap warga negara adalah semua warga negara baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menempuh pendidikan baik itu pendidikan formal, non formal maupun informal menurut aturan yang berlaku.

Tentang masalah hak antara laki-laki dan perempuan selalu tidak bisa dilepaskan dari isu gender. Sejak jaman penjajahan sampai era modern tentang arti penting pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan masih jadi perdebatan. Seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan maka tersedia cukup payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan gender di dalam institusi pendidikan. Selain itu, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga sudah menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu ranah yang perlu dijadikan sebagai acuan operasional penyusunan kurikulum. Ini artinya, dari sisi legal-formal, PUG (Pengarusutamaan Gender) bidang Pendidikan tak perlu disangsikan lagi untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas.

Bertitik tolak dari payung hukum tersebut, Kepala Madrasah MI Matholiul Huda Troso 02 berupaya mengaplikasikan aturan tersebut dalam kegiatan di madrasah yang dipimpinnya, baik dimasukkan ke dalam kurikulum pengajaran sebagai pesan tersembunyi, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari pihak sekolah sedapat mungkin berlaku adil dan bijak melaksanakan keseimbangan gender dalam pendidikan. Walaupun dari Kepala Madrasah belum mengeluarkan peraturan secara jelas tetapi dalam setiap peraturan yang dikeluarkan dibuat terdapat kesetaraan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang rapat.

Seperti dalam pengelolaan kesiswaan dari data yang di dapat selama 3 tahun terakhir penerimaan peserta didik baru serta akumulasi keseluruhan peserta didik yang ada di MI Matholiul Huda Troso 02 bisa dikatakan setara antara siswa laki-laki dan perempuan bahkan bisa dilihat pada data hasil penelitian tentang jumlah siswa, perbandingan antara siswa laki-laki lebih sedikit dibanding siswa perempuan.

Begitu pula dalam pemberian bantuan pendidikan, baik dalam bentuk BOS dan beasiswa, pemberiannya berbanding lurus dengan jumlah prosentase siswa secara keseluruhan. Dalam kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh madrasah keikutsertaan siswa bisa dikatakan setara.

Terdapat satu masalah siswa putus sekolah dan siswa tidak lulus dialami oleh salah seorang siswa laki-laki, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa laki-laki lebih bodoh daripada perempuan, dalam kasus ini adalah siswa mengalami masalah dalam keluarganya yang menjadikan siswa untuk memilih berhenti sekolah beberapa waktu, namun siswa masih memiliki keinginan untuk bersekolah kembali.

Dalam pengelolaan sarana dan prasarana, Kepala Madrasah MI Matholiul Huda 02 telah mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi fasilitas pendidikan yang ada yang bisa digunakan secara baik oleh semua siswa dan tenaga kependidikan (guru dan karyawan). Ada fasilitas kamar mandi yang terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan begitu pula pada kamar mandi guru. Kamar mandi sering menjadi sorotan yang penting

dalam pembahasan isu gender, karena biasanya terjadi pelecehan seksual atau hal-hal yang dianggap privasi.

Dalam pengelolaan umum, kinerja Kepala Madrasah bisa dikatakan mampu mengelola isu gender dimasukkan dalam lingkup pendidikan. Kepala Madrasah memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, melakukan koordinasi dan mengelola instrumen pendukung, melakukan supervisi serta evaluasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam dunia pendidikan seperti hal gender ini.

Secara tidak langsung, selama memimpin MI Matholiul Huda 02 sejak tahun 1997, Kepala Madrasah telah menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam institusi yang dipimpinnya.

Harus diakui, implementasi pengelolaan gender (PUG) dalam proses pembelajaran masih terkendala banyak faktor. Selain kultur masyarakat kita sudah demikian lama dicengkeram oleh kokohnya budaya patriarki yang memandang kaum perempuan sebagai “makhluk kelas dua”, dukungan anggaran dan fasilitas sekolah yang memberikan ruang gerak yang memadai terhadap implementasi PUG bidang pendidikan juga belum berlangsung seperti yang diharapkan. Dalam konteks demikian, sangat beralasan kalau implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas belum bisa berlangsung mulus dan kondusif.

Salah satu strategi yang tepat untuk memperkenalkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Jika dilakukan secara simultan dan berkelanjutan, perubahan *mind-set* anak-anak akan terus berlangsung dari generasi ke generasi, hingga akhirnya pada kurun waktu beberapa tahun mendatang, mitos dan kultur patriarki akan bisa terbebaskan. Peran dan posisi kaum perempuan di ranah publik juga makin diakui, hingga tak muncul lagi peristiwa bias gender, baik dalam bentuk *marginalisasi* (peminggiran), *double burden* (peran ganda), kekerasan (*violence*), *stereo-type* (citra baku/pelabelan), maupun *subordinasi* (penomorduaan) yang menimpa kaum perempuan.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Kepala Sekolah Madrasah dalam Manajemen Pengelolaan Gender di MI Matholiul Huda Troso 02

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Gender antara lain:

1. Kultur masyarakat

Kultur masyarakat sangat berperan penting terhadap keberhasilan suatu metode atau kerja yang diterapkan. Masyarakat yang cenderung tertutup atau bersifat eksklusif akan susah untuk menerima hal-hal baru seperti halnya penerapan perspektif gender dalam dunia pendidikan. Dan untuk masyarakat yang memiliki cara pikir terbuka, yang menyadari setiap orang memerlukan pendidikan yang layak dan sesuai akan secara terbuka dan senang hati menerima pemikiran tentang gender dalam pendidikan ini. Masyarakat desa Troso yang memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin tenun ikat dan sebagian lagi bekerja di sektor kayu furniture seperti kebanyakan penduduk Jepara lainnya, adakalanya berpikiran bahwa pendidikan untuk perempuan belum terlalu penting. Walaupun kenyataannya banyak yang lulus sampai dengan SMA/MA tetapi kualitas pemikiran yang ada mengenai arti penting pendidikan masih kurang.

2. Kreativitas serta inovasi

Kepala Madrasah harus berani melakukan terobosan baru untuk dapat memajukan pendidikan di institusi yang dipimpinnya, dengan memanfaatkan kreativitas serta mau melakukan inovasi sebagai langkah berani untuk selangkah lebih maju dibanding institusi yang sejenis. Melalui penerapan Pengelolaan Gender dalam dunia pendidikan hal ini merupakan sebuah langkah kreatif dan dalam pelaksanaannya perlu inovasi dalam penerapannya. Disaat pihak lain masih merasa tabu untuk mengatakan perihal gender, Kepala Madrasah MI Matholiul Huda Troso 02 telah lebih dahulu memasukkan isu gender dalam kegiatan di institusinya.

3. Pengambilan Keputusan

Setiap gerak langkah bisa direalisasikan secara nyata maka diperlukan sebuah keputusan. Apakah hal tersebut terus dijalankan atau dihentikan. Dengan sikap mengambil keputusan dan mengelola gender dalam kegiatan dalam lingkungan pendidikan MI Matholiul Huda Troso 02, berarti secara tidak langsung Kepala Madrasah MI Matholiul Huda Troso 02 telah melaksanakan salah satu tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tidak memandang laki-laki maupun perempuan.

4. Koordinasi

Untuk dapat melancarkan program yang ada maka dibutuhkan suatu koordinasi dengan elemen-elemen pendukung, seperti guru, komite sekolah dan masyarakat sekitar.

5. Evaluasi

Dalam melaksanakan program berjalan, tentu terdapat kendala serta masukan saran selama program berjalan. Hal tersebut perlu diadakan evaluasi sehingga ditemukan cara yang tepat atau keputusan pendukung kelancaran program pengelolaan gender di institusi pendidikan.

Dengan adanya payung hukum yang lengkap dari UUD 1945, UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, serta Peraturan Mendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendiknas No. 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan maka Kepala Madrasah dapat melaksanakan pengelolaan *gender* di MI Matholiul Huda Troso 02 sesuai dengan kebutuhan serta kultur yang ada.

Perlu dijelaskan pula, bahwa di Indonesia belum terdapat kurikulum tentang gender yang berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran, bahkan kurikulum yang berlaku masih banyak mengandung bias gender. Maka lewat kurikulum yang berbasis muatan lokal, sebelum diberlakukan sebagai kurikulum nasional, kepala sekolah dapat mengambil terobosan sebagai suatu inovasi dalam menerapkan pembelajaran mengenai *gender* di sekolah yang dipimpin. Seperti pembelajaran tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan

perempuan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Dapat juga memasukkan tentang hukum-hukum agama yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan..

Sedangkan siswa dalam menjalankan kegiatan keseharian di lingkungan sekolah haruslah mendapat pengawasan, bimbingan seta pengarahan dari kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat berperilaku sesuai dengan kodratnya dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditetapkan, sebagai contoh siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang dan bertindik, tetapi bagi siswa perempuan hal tersebut tidak berlaku, aturan ini mengatur hak dan kewajiban yang berbeda antara siswa laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam mengikuti pelajaran baik siswa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Walaupun terkesan terdapat perbedaan dalam perlakuan hal tersebut malah mengarah kepada keadilan *gender*, sesuai dengan hak dan kewajiban kodrati yang harus dijalankan dalam kehidupan sosialnya.

Begitu juga kebijakan yang harus dijalankan oleh guru dan karyawan, agar lebih mengedepankan keadilan *gender*, kepala sekolah dapat menyeimbangkan jumlah guru dan karyawan yang ada, pembagian tugas dan fungsi yang diberikan kepada guru dan karyawan juga harus seimbang. Selain melihat kodratnya (laki-laki atau perempuan), juga harus dilihat kompetensi dan kapabelitasnya. Karena guru tidak sebatas mengajar tetapi juga sebagai contoh bagi siswa dan juga lingkungannya. Jadi harus dilihat benar-benar hak dan kewajiban guru tersebut dalam mengambil peran di lingkungannya.